



CALK SEMESTER I TA 2025

Stasiun PSDKP Pontianak

Jl. Dr. Moh. Hatta, Sungai Rengas, Kec.
Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya

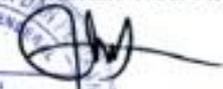
KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak adalah salah satu satker Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SKDP Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PSDKP Pontianak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kubu Raya, 17 Juni 2025
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,


Eya Yuniarto-Suharto, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19850616 200701 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	64
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	73
F. Pengungkapan Penting Lainnya	77
VI. Lampiran dan Daftar	

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
JL Dr. Moh Hatta, Sui Rengas, Kec. Sui Kakap, Kab. Kubu Raya, Kalbar
TELEPON (0561) 773321, FAXIMILE (0561) 773321

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kubu Raya, 17 Juni 2025
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,



Bayu Yuniarto Suharto, S.St.Pi, M.Pi
NIP.198506162007011003

Laporan Keuangan Stasiun PSKDP Pontianak Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.775.888.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2025 adalah sebesar Rp10,671,644,763 atau mencapai 29.67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp35,964,014,000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp40.070.258.100 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp937.811.740; Aset Tetap (neto) sebesar Rp39.132.446.360; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.244.578.055 dan Rp38.825.680.045.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp320, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp11.680.394.964 sehingga terdapat Defisit

dari

Kegiatan Operasional senilai Rp(11.680.394.964). Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp2.775.888 dan sebesar (Rp11.677.618.340) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(11.677.618.340).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp39.721.512.356 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(13.498.776.933) kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai aset sebesar Rp0, Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp0, Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0, Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0 serta koreksi nilai aset tetap non revaluasi senilai Rp0, Koreksi lain – lain Rp152.958.193 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.628.827.836 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp37.004.521.452

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI	Angg	REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1		2.776.624		13.206.796
JUMLAH PENDAPATAN		-	2.776.624	0,00	13.206.796
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	11.669.759.000	6.350.468.544		6.501.983.301
Belanja Barang	B.4	24.001.805.000	4.289.763.219		7.998.763.525
Belanja Modal	B.5	292.450.000	31.413.000		329.037.200
JUMLAH BELANJA		35.964.014.000	10.671.644.763	29,67	14.829.784.026

II. NERACA

**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	120.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	3.887.600
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	(19.438)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	797.126.246
Jumlah Aset Lancar		120.000.000	800.994.408
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	11.836.746.000	11.836.746.000
Peralatan dan Mesin	C.15	59.872.496.288	60.109.804.498
Gedung dan Bangunan	C.16	14.586.826.318	14.402.001.836
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	22.153.264.709	22.153.264.709
Aset Tetap Lainnya	C.18	647.298.080	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	151.528.500
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(74.353.840.283)	(70.160.999.653)
Jumlah Aset Tetap		34.742.791.112	38.492.345.890
ASET LAINNYA			
Dana yang dibatasi penggunaannya	C.21	-	1.060.878.000
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	1.060.878.000
JUMLAH ASET		34.862.791.112	40.354.218.298
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	120.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	549.218.555	1.124.607.360
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Utang yang belum ditagihkan	C.28	575.359.500	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.244.578.055	1.124.607.360
JUMLAH KEWAJIBAN		1.244.578.055	1.124.607.360
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.28	38.825.680.045	-
JUMLAH EKUITAS DANA		38.825.680.045	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		40.070.258.100	1.124.607.360

III. LAPORAN OPERASIONAL

**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	320	-
JUMLAH PENDAPATAN		320	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6.710.896.993	6.910.296.602
Beban Persediaan	D.3	31.612.500	90.786.022
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.161.785.049	5.866.334.887
Beban Barang Pemeliharaan	D.5	582.444.363	1.115.930.960
Beban Perjalanan Dinas	D.6	193.656.059	1.138.402.077
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	1.821.223.753
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		11.680.394.964	16.942.974.301
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(11.680.394.644)	(16.942.974.301)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		2.775.888	9.318.828
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		736	48
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.776.624	9.318.876
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(11.677.618.020)	(16.933.655.425)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBPN	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(11.677.618.020)	(16.933.655.425)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	39.721.512.356	41.153.798.446
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(13.498.776.933)	(16.933.655.105)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	152.958.193	19.438
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1		-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2		-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3		-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI PERSEDIAAN	E.3.4		-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5		-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6		-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7		19.438
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	10.628.827.836	14.816.577.230
EKUITAS AKHIR	E.5	37.004.521.452	39.036.740.009

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun PSDKP memiliki misi yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 711 yang meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak berdasarkan Provinsi meliputi Perairan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di amanahkan adalah melakukan penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun PSDKP Pontianak berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu **“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.”**

Sedangkan Misi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

daya kelautan dan perikanan

- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020 – 2025 salah satu yang diamanatkan adalah pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Disamping itu, terdapat pula arahan untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

1. Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*; serta
2. Pembinaan (penataan) nelayan lokal

UPT Stasiun PSDKP Pontianak melalui SK Keputusan Direktur Jenderal PSDKP No.10/KEP-DJPSDKP/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penempatan Kapal Pengawas Perikanan Dirjen PSDKP di UPT terdapat 2 unit kapal pengawas yaitu KP. Hiu Macan 001 dan KP. Hiu 11. *Speedboat* yang terdapat pada Stasiun PSDKP Pontianak berjumlah 5 unit yaitu Napoleon 003, Napoleon 037, Napoleon 038, TB. 01, dan *Searider*. Pembelian BBM dengan menggunakan voucher dilakukan untuk Napoleon 037 dan *searider* yang diambil di SPBU yang berada di Pontianak dan Napoleon 038 yang dapat diambil di SPBU yang berada di Sambas.

Sampai dengan Semester I TA 2025 terdapat barang bukti

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

berupa kapal ikan asing sebanyak 16 kapal yang terdapat di Stasiun PSDKP Pontianak dengan rincian:

-
- 3 kapal BMKT yang masih tahap proses somasi
- 1 kapal yang dihibahkan ke UNDIP
- 2 kapal yang dihibahkan ke BPRSDM
- 2 kapal yang dihibahkan ke KKP, dan
- 7 kapal kasasi yang dititipkan
- 1 Perahu fiber bermesin titipan kejaksaan

Jumlah pegawai negeri sipil Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 73 orang yang terdiri dari Golongan IV 1 orang Golongan III sebanyak 59 orang golongan II sebanyak 13 orang, untuk tenaga PPPK Golongan IX sebanyak 6 orang, golongan VII sebanyak 5 orang golongan V sebanyak 7 orang. Dan untuk tenaga PPNPN sebanyak 23 orang dan untuk tenaga PJLP sebanyak 18 orang. dengan rincian pegawai sebagai berikut:

No	Unit Kerja	PNS	Pegawai Kontrak		PPPK	Jumlah
			PPNPN	PJLP		
1	Stasiun PSDKP Pontianak	27	9	13	8	57
	KP. Hiu Macan 01	12	-	-	3	12
	KP. Hiu 11	8	-	-	2	8
2	Wilker PSDKP Sungai Rengas	2	2	-	1	4
3	Wilker PSDKP Mempawah	1	2	-	-	3
4	Wilker PSDKP Entikong	1	2	1	-	4
5	Wilker PSDKP Kapuas Hulu	2	1	1	-	4
6	Satwas SDKP Sambas	5	1	2	1	8
7	Wilker PSDKP Singkawang	1	1	-	-	2
8	Wilker PSDKP Jagoi babang	1	1	-	-	2
9	Wilker PSDKP Selakau	1	-	-	1	1
10	Wilker PSDKP Sajingan	0	1	-	-	1
11	Satwas SDKP Kayong Utara	4	2	-	-	6
12	Wilker PSDKP Ketapang	2	-	-	1	2
13	Satwas SDKP Kotawaringin Barat	3	1	1	-	5
14	Wilker PSDKP Seruyan	2	-	-	1	2
Total		72	23	18	18	121

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

Pada anggaran tahun 2025 terdapat kegiatan yang merupakan Prioritas Nasional yaitu;

- Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada, dan Infrastruktur Pengawasan (2350) dengan RO:
 - Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP,
 - Operasi Kapal Pengawas,
 - Operasi Speedboat Pengawas,
 - Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun, dan
 - Armada Pengawasan SDKP yang dirawat.
- Kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan (2352) dengan RO:
 - Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya
 - Unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak
- Kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan (2353) dengan RO Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara First In First Out (FIFO) di tahun 2021 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun PSDKP Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Nomor 42 Tahun 2014 yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PSDKP Pontianak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Pontianak adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan adalah sebagai berikut:
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
Macet	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang

Minilk Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu pelaksanaan, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak memiliki nomor DIPA SP DIPA-032.05.2.440847/2025 tanggal 02 Desember 2025 dengan nomor digital stamp 3261-4542-7322-8205. Selama Tahun Anggaran 2025, Stasiun PSDKP Pontianak telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 5 (lima) kali. Rincian anggaran belanja Stasiun PSDKP Pontianak 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	2.776.624
Pendapatan Lain - Lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	2.776.624
Belanja		
Belanja Pegawai	11.669.759.000	11.669.759.000
Belanja Barang	24.001.805.000	24.001.805.000
Belanja Modal	292.450.000	292.450.000
Jumlah Belanja	35.964.014.000	35.964.014.000

Pada awal tahun 2025 terdapat anggaran yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp8.265.448.000 dengan rincian Rp6.839.243.000 disebabkan belum dilengkapi dengan surat persetujuan Menteri keuangan terkait pagu PNBPN dan Rp. 1.426.205.000 disebabkan anggaran tidak tertampung di rincian operasional teknis karena index SBKK.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

Kode Kegiatan	Pagu	Blokir Semula	
		Kode 2	Kode A
	35.964.014.000	6.839.243.000	1.426.205.000
2350	16.233.544.000	6.727.488.000	456.527.000
2351	256.615.000	-	84.426.000
2352	892.537.000	111.755.000	464.235.000
2353	400.000.000	-	70.368.000
2355	18.181.318.000	-	350.649.000

Rincian Revisi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
Revisi ke 1 tanggal 21 Februari 2025 dengan *digital stamp*
DS: 0081-8291-0157-8083 sesuai dengan dengan Nota
Dinas Sekretaris Jenderal di atas yang merujuk kepada
Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025, dan surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Nomor S-
27/PB/2025 tanggal 20 Januari 2025 hal Dukungan
Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah, maka setiap Unit Kerja
Eselon I lingkungan KKP untuk melakukan identifikasi
rencana efisiensi anggaran tahun 2025 maka stasiun psdkp
Pontianak melakukan efisiensi anggaran tahun 2025
sebesar Rp16.758.688.000 dengan rincian Rp2.423.803.000
disebabkan belum dilengkapi dengan surat persetujuan
Menteri keuangan terkait pagu PNBPN dan
Rp14.334.885.000 disebabkan kebijakan penyesuaian
belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan
rincian sebagai berikut:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

Kode Kegiatan	Pagu	Blokir Semula		Blokir Menjadi		Anggaran Yang Tidak Diblokir
		Kode 2	Kode A	Kode 2	Kode A	
	35.964.014.000	6.839.243.000	1.426.205.000	2.423.803.000	14.334.885.000	19.205.326.000
2350	16.233.544.000	6.727.488.000	456.527.000	2.423.803.000	9.549.075.000	4.260.666.000
2351	256.615.000	-	84.426.000	-	207.230.000	49.385.000
2352	892.537.000	111.755.000	464.235.000	-	786.857.000	105.680.000
2353	400.000.000	-	70.368.000	-	400.000.000	-
2355	18.181.318.000	-	350.649.000	-	3.391.723.000	14.789.595.000

- Revisi ke 2 tanggal 24 Maret 2025 dengan Digital Stamp DS: 3461-7080-1707-1207 yang merupakan revisi DJA berupa pergeseran anggaran 2350.999 (output cadangan) sebesar Rp528.600.000 ke 2350.RCG (sarana bidang pertahanan kehutanan dan lingkungan hidup) serta pergeseran anggaran dari 2352.999 (output cadangan) ke anggaran 2352.QIC (pengawasan dan pengendalian Lembaga) Rp111.755.000
- Revisi ke 3 tanggal 14 April 2025 yang merupakan revisi DJA dengan digital stamp DS: 9300-0180-0577-2920 berupa buka blokir anggaran dengan nilai total blokir menjadi Rp12.101.653.000 dengan rincian Rp6.189.708.000 disebabkan belum dilengkapi dengan surat persetujuan Menteri keuangan terkait pagu PNPB dan Rp5.911.945.000 disebabkan kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya.

Kode Kegiatan	Pagu	Blokir Semula		Blokir Menjadi		Anggaran Yang Tidak Diblokir
		Kode 2	Kode A	Kode 2	Kode A	
	35.964.014.000	2.423.803.000	11.293.811.000	6.189.708.000	5.911.945.000	32.572.291.000
2350	16.233.544.000	2.423.803.000	9.549.075.000	6.189.708.000	1.404.000.000	16.233.544.000
2351	256.615.000	-	207.230.000	-	207.230.000	256.615.000
2352	892.537.000	-	786.857.000	-	786.857.000	892.537.000
2353	400.000.000	-	400.000.000	-	400.000.000	400.000.000
2355	18.181.318.000	-	350.649.000	-	3.113.858.000	14.789.595.000

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

- Revisi ke 4 tanggal 23 mei 2025 yang merupakan revisi DJA dengan DS: 3261-4542-7322-8205 berupa buka blokir anggaran PNBPN sebesar Rp6.189.708.000 sehingga sisa blokir menjadi Rp5.911.945.000 kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	NAIK (TURUN) %
Belanja				
Belanja Pegawai	11.669.759.000	11.669.759.000	6.350.469.193	54,42
Belanja Barang	24.001.805.000	24.001.805.000	4.289.763.219	17,87
Belanja Modal	292.450.000	292.450.000	31.413.000	10,74
Jumlah Belanja	35.964.014.000	35.964.014.000	10.671.645.412	29,67

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Stasiun PSDKP Pontianak terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dan V dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional yang pelaksanaannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 5 kegiatan prioritas, yang tersebar di Stasiun PSDKP Pontianak dengan pagu mencapai Rp19.913.930.000 dan realisasi sebesar Rp5.819.185.036 dengan rincian sebagai berikut:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN			
		ANGGARAN	REALISASI	%	Satuan	Target	Capaian	%
2350.QH D	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	13.494.509.000	2.027.537.960	15,02				
2350.QH D.001	Operasi Kapal Pengawas	13.170.689.000	1.979.910.160	15,03	Operasi	63	32	50,79
2350.QH D.003	Operasi Speedboat Pengawas	323.820.000	47.627.800	14,71	Operasi	20	2	10,00
2350.RC G	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan	1.335.035.000	528.182.154	39,56				
2350.RC G.001	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	1.335.035.000	528.182.154	39,56	Unit	7	3	42,86
2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	676.000.000	33.399.401	4,94				
2352.QI C.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	226.000.000	24.149.401	10,69	Lembaga	20	12	60,00
2352.QI C.002	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang	450.000.000	9.250.000	2,06	Lembaga	30	5	16,67
2353.QD D	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok	400.000.000	0	0				
2353.QD D.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	400.000.000	0	0	Kelompok Masyarakat	4	0	-
TOTAL		15.905.544.000	2.589.119.515	60				

2. Prioritas Nasional V – Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, yang tersebar di Stasiun PSDKP Pontianak dengan pagu mencapai

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KET
		ANGGARAN	REALISASI	%	Satuan	Target	Capaian	%	
2350.RBQ	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	1,638,200,000	54,356,700	3.32					
2350.RBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	1,638,200,000	54,356,700	3.32	Unit	1 Unit	0	-	
TOTAL		1,638,200,000	54,356,700	3.32					

B.1 Pendapatan

Realisasi

Pendapatan

Rp2.776.624

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp2.776.624 Dibandingkan dengan periode 30 Juni 2024 sebesar Rp 13.206.796 nilai

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 78.98%. Hal tersebut disebabkan terdapat nilai lelang dan pengembalian belanja pegawai tahun lalu lebih besar daripada tahun yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 30 Juni 2025 dan Juni 2024

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2025	REALISASI 30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.775.888	9.318.828	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	3.887.648	0,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	320	0,00
Pendapatan Anggaran Lain - lain	736	-	0,00
Jumlah	2.776.624	13.206.796	-78,98

Realisasi pendapatan sebesar Rp2.776.624 dengan uraian:

- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp2.775.888 dengan rincian:
 - Penjualan peralatan komputer, perabot kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp2.775.888 dengan NTPN E83ACONAODEJ64SF dan NTB 097479705158 tanggal 22 Januari 2025 melalui risalah lelang nomor 9/11.01/2025-01 tanggal 20 Januari 2025.
- Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Rp736 yang dibayarkan melalui nomor SPM 00020A tanggal 13 Januari 2025 dan nomor SPM 00021A tanggal 14 Januari 2025.

Sampai dengan bulan Juni TA 2025 Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan pemrosesan sanksi administratif, yang disetorkan langsung ke bendahara penerimaan Sekretariat Jenderal PSDKP. Penetapan denda administratif tersebut dilakukan terhadap:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

- KM. Herry melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI dan mendaratkan ikan tidak sesuai dengan pelabuhan pangkalan dengan jumlah denda administratif sebesar Rp32.175.000
- PT. Energi Unggul Persada melakukan pelanggaran administratif tidak memiliki perijinan berusaha terkait pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) dengan jumlah denda administratif sebesar Rp28.470.000
- KM. Sumber Jaya melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI dengan jumlah denda administratif sebesar Rp291.349.080
- PT. Chris Makmur Lestari (PD. CHRIS) melakukan kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau yang termasuk Appendiks CITES yang tidak memenuhi perizinan berusaha dengan jumlah denda administratif sebesar Rp159.600.000
- PT. Tri jaya Sempurna Sejati melakukan kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau yang termasuk Appendiks CITES yang tidak memenuhi perizinan berusaha dengan denda administratif sebesar Rp91.200.000

Realisasi

Belanja Negara

Rp10.671.644.763

B.2 Belanja

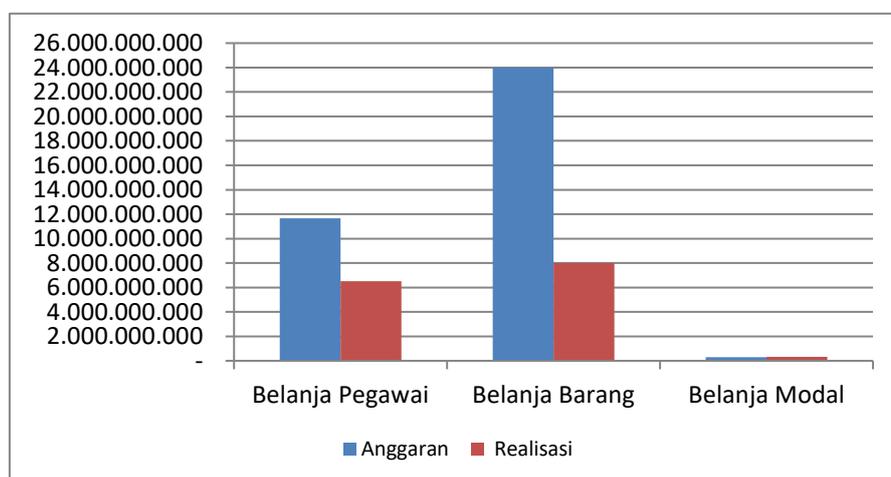
Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp10.671.644.763 atau 35,35% dari anggaran belanja sebesar Rp35.964.014.000. Sedangkan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp14.829.784.026 Perbandingan realisasi belanja Per 30 Juni 2025 dan 2024 menunjukkan bahwa realisasi belanja

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

pada 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 35.35% dibandingkan dengan realisasi belanja pada 30 Juni 2024. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2025	REALISASI 30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6.350.468.544	6.501.983.301	(2,33)
Belanja Barang	4.289.763.219	7.998.763.525	(46,37)
Belanja Modal	31.413.000	329.037.200	(90,45)
Total Belanja (Netto)	10.671.644.763	14.829.784.026	(28,04)



Belanja

Pegawai

Rp6.350.468.544

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.350.468.544 dan Rp6.501.983.301 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

pembentukan modal.

Realisasi belanja 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 53.9% dari 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pangkat dan kenaikan grade tunjangan kinerja beberapa pegawai Stasiun PSDKP Pontianak serta adanya penambahan pegawai PPPK pada Semester II Tahun 2024 sebanyak 16 orang, dan penambahan pegawai PPPK pada bulan April sebanyak 2 org.

Perbandingan Belanja Pegawai 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2025	REALISASI 30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	2.101.955.100	2.215.487.700	(5,12)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.133	36.040	(10,84)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	180.761.140	188.533.890	(4,12)
Belanja Tunj. Anak PNS	57.613.656	61.307.828	(6,03)
Belanja Tunj. Struktural PNS	7.200.000	7.200.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	54.470.000	49.120.000	10,89
Belanja Tunj. PPh PNS	18.502.465	19.459.554	-
Belanja Tunj. Beras PNS	138.322.200	148.967.940	(7,15)
Belanja Uang Makan PNS	170.455.000	154.443.000	10,37
Belanja Tunjangan Umum PNS	76.765.000	86.620.000	(11,38)
Belanja Gaji Pokok PPPK	410.986.400	396.644.000	
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.862	9.285	
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	27.563.200	24.301.840	
Belanja Tunjangan Anak PPPK	7.965.184	7.134.488	
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	36.000.000	34.980.000	
Belanja Tunjangan Beras PPPK	27.229.920	21.653.580	
Belanja Uang Makan PPPK	37.956.000	3.621.000	
Belanja Uang Lembur	60.155.000	31.512.000	
Belanja Uang Lembur PPPK	14.450.000	148.231.000	(90,25)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2.441.292.782	34.025.000	
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	480.786.151	2.420.682.412	(80,14)
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK		448.012.744	
Jumlah Belanja Netto (LRA)	6.350.469.193	6.053.970.557	4,90
Pengembalian Belanja Pegawai	(649)	926.482	-
Jumlah Belanja Bruto (Neraca)	6.350.468.544	6.054.897.039	4,88

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

Tidak Terdapat pengembalian belanja pegawai selama periode januari s/d juni 2025

Belanja Barang

Rp6.350.468.544

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.350.468.544 dan Rp6.501.983.301 Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 53,9% dari Realisasi Belanja Barang TA 2025. Hal tersebut dikarenakan kerusakan mesin yang dialami oleh Kapal Pengawas Hiu Macan 01 sehingga kapal tidak dapat beroperasi dan belanja operasional kapal belum dapat terealisasi. Sebagian besar belanja barang berasal dari belanja barang non operasional yaitu belanja bahan berupa bahan bakar minyak untuk KP. Hiu Macan 001 dan KP. Hiu 11. Kapal pengawas tersebut dipergunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kapal asing dan kapal indonesia yang melakukan operasional di WPP-RI 711.

Selain itu terdapat belanja barang untuk operasional perkantoran antara lain berupa pembayaran langganan daya dan jasa, honor pegawai kontrak, konsumsi rapat, atk dan komputer supplies, pemeliharaan, perjalanan dinas dan lainnya yang mendukung kegiatan operasional kantor.

Perbandingan Belanja Barang
per 30 Juni 2025 dan 2024

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2025	REALISASI 30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (5211)	630.957.603	728.454.898	(13,38)
Belanja Barang Persediaan (5218)	17.935.500	68.818.572	(73,94)
Belanja Barang Non Operasional (5212)	2.348.249.350	4.519.517.263	(48,04)
Belanja Pemeliharaan (5231)	614.176.857	962.572.234	(36,19)
Belanja Perjalanan Dinas (5241)	193.656.059	1.138.402.077	(82,99)
Belanja Jasa (5221)	31.413.000	580.998.481	(94,59)
Jumlah Belanja Netto (LRA)	3.836.388.369	7.998.763.525	(52,04)
Pengembalian Belanja	649	348.800	-
Total Belanja Bruto (NERACA)	3.836.389.018	7.999.112.325	(52,04)

Belanja Modal
Rp31.413.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp31.413.000 dan Rp329.037.200

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 90,45%.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2025	REALISASI 30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.413.000	257.864.000	(87,82)
Belanja Modal Penambahan Peralatan dan Mesin		0	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan		71.173.200	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi		0	0,00
Belanja Modal Irigasi		0	0,00
Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan		0	
Belanja Modal Jaringan		0	0,00
Jumlah Belanja	31.413.000	329.037.200	(90,45)
Pengembalian Belanja	0	-	-
Jumlah Belanja	31.413.000	329.037.200	(90,45)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, hal tersebut disebabkan tidak dianggarkannya belanja modal tanah pada tahun anggaran 2025.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp31.413.000 dan Rp329.037.000 yang mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2025 yang berasal dari pembelian peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30 Juni 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2025	REALISASI 30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) %
Lemari Besi/Metal		5.100.000	
Filling kabinet besi		4.700.000	
Kursi Besi/Metal			
Papan Pengumuman		14.300.000	
Kursi Fiber Glass/Plastik		1.600.000	
AC Split		24.914.000	
Sound System		21.400.000	
Digital LED Running Text		5.500.000	
Kamera Digital		29.999.999	
Kamera Konferensi		19.800.000	
Laptop	31.413.000	70.300.000	-55,32
Tablet PC		40.200.001	
Printer		20.050.000	
Televisi			
Filling Cabinet Besi			
Mesin Absensi			
Scanner			
Jumlah Belanja Kotor	31.413.000	257.864.000	-87,82
Pengembalian	0	-	-
Jumlah Belanja	31.413.000	257.864.000	-87,82
Pengembalian	0	-	-
Jumlah Belanja	31.413.000	257.864.000	-87,82

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.4 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing – masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut diperoleh dari:

B.5.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.5.1. Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan

Realisasi belanja modal penambahan nilai jaringan pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.6 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat anggaran Belanja Modal Lainnya pada 30 Juni 2025 dan 2024.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Pada 30 Juni 2025 dan 2024 tidak terdapat belanja bantuan sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp51.785.193*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp51.785.193,- dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai di Brankas	12.678.900	
Uang di Rekening Bank	39.106.293	
Uang Muka (Voucher)	60.000.000	
Saldo BPP	5.978.300	
Kwitansi UP yang belum di SPM-kan	2.236.500	
Sub Total I	119.999.993	-
Saldo Lainnya		
Sub Total II	-	-
Kas Bendahara Pengeluaran pada Neraca		-
Selisih Kas Bendahara Pengeluaran (tidak ada pecahan uang kecil)	7	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan CEK NERACA

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Kas Lainnya dan

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

<i>Setara Kas Rp0</i>	Juni 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp.0 dan Rp0.
<i>Piutang PNB Rp0</i>	C.4 Piutang PNB Tidak terdapat saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.
<i>Piutang Bukan Pajak Rp0</i>	C.5 Piutang Bukan Pajak Piutang bukan pajak per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0
<i>Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0</i>	C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.
<i>Bagian Lancar TPA Rp0</i>	C.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp0</i>	C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0
<i>Beban Dibayar di Muka Rp0</i>	C.9 Beban Dibayar di Muka Tidak terdapat saldo Beban Dibayar di Muka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.
<i>Pendapatan yang Masih</i>	C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

Harus Diterima Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per
Rp 0 tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Persediaan

C.11 Persediaan

Rp817.811.740

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp817.811.740 dan Rp797.126.246.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	30 Juni 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	4.003.750	17.680.750
Suku Cadang	813.807.990	779.445.496
Jumlah	817.811.740	797.126.246

Rincian mutasi transaksi persediaan pada modul pelaporan adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Persediaan Habis Pakai Per 1 Januari 2025 (Saldo Awal 2025)	797.126.246
Realisasi Belanja 521811 30 Juni 2025	17.935.500
Realisasi Belanja 523123 30 Juni 2025	136.053.107
Total Realisasi 30 Juni 2025	153.988.607
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan	0
Total	0
Saldo Awal + Total Realisasi + Total	951.114.853
Beban Persediaan Konsumsi	31.612.500
Beban Persediaan Suku Cadang	101.690.613
Total Beban	133.303.113
Selisih	817.811.740
Neraca 30 Juni 2025	817.811.740
Selisih	0

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

TRANSAKSI	NILAI
SALDO AWAL PADA 1 JANUARI 2024	797.126.246
MUTASI TAMBAH	
TOTAL PEMBELIAN (pada SAKTI modul PERSEDIAAN)	153.988.607
TOTAL MUTASI TAMBAH	153.988.607
MUTASI KURANG	
BEBAN PERSEDIAAN (pada LO)	133.303.113
TOTAL MUTASI KURANG	133.303.113
SALDO AKHIR PADA 30 JUNI 2024	817.811.740

Rincian mutasi transaksi pada modul persediaan adalah sebagai berikut:

TRANSAKSI	NILAI
SALDO AWAL PADA 1 JANUARI 2025	797.126.246
MUTASI TAMBAH	
M02 Pembelian	153.988.607
TOTAL MUTASI TAMBAH	153.988.607
MUTASI KURANG	
K01 Habis Pakai	133.303.113
TOTAL MUTASI KURANG	133.303.113
SALDO AKHIR PADA 30 JUNI 2025	817.811.740

Mutasi tambah persediaan sebesar Rp127.963.072 merupakan transaksi pembelian dengan rincian:

- Barang Konsumsi sebesar Rp 17.935.500
- Suku cadang sebesar Rp136.053.107

Mutasi kurang persediaan sebesar Rp299.878.248 berupa transaksi habis pakai dengan rincian:

- Barang Konsumsi sebesar Rp31.612.500
- Suku Cadang sebesar Rp101.690.613

Rincian persediaan periode 30 Juni 2025 adalah:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

Kode	Uraian	Nilai
117111	BARANG KONSUMSI	
1.01.03.01.001	Alat Tulis	372.000
1.01.03.01.003	Penjepit Kertas	386.000
1.01.03.01.004	Penghapus/Korektor	54.000
1.01.03.01.005	Buku Tulis	227.750
1.01.03.01.007	Penggaris	18.000
1.01.03.01.010	Alat Perekat	124.500
1.01.03.01.012	Staples	308.000
1.01.03.01.013	Isi Staples	100.000
1.01.03.01.999	Alat Tulis Kantor Lainnya	158.000
1.01.03.02.001	Kertas HVS	2.255.500
JUMLAH BARANG KONSUMSI		4.003.750
117114	SUKU CADANG	
1.01.02.01.003	Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor	813.807.990
JUMLAH SUKU CADANG		813.807.990
TOTAL		817.811.740

Berdasarkan Berita Acara Stok Opname Fisik Persediaan Nomor 253/PSDKPSta.4/PL760/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025. Persediaan barang konsumsi sebesar Rp4.003.750 terdiri dari Alat Tulis, Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Penggaris, Alat Perekat, Staples, Isi Staples, Alat Tulis Kantor Lainnya, Kertas HVS. Persediaan suku cadang sebesar Rp 813.807.990 yang merupakan Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor dimana suku cadang tersebut merupakan persediaan yang berasal dari suku cadang kapal pengawas Hiu Macan 01, Hiu 11, Speedboat Pengawas, Rigid Inflatable Boat dan Gudang Stasiun PSDKP Pontianak yang masih ada tahun 2025.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

Tagihan TP/TGR **C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Rp0

Tidak terdapat nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,-

Tagihan Penjualan **C.13 Tagihan Penjualan Angsuran**

Angsuran Rp.0

Tidak ada saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang **C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Rp.0

Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Tanah **C.15 Tanah**

Rp11.836.746.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.836.746.000 dan Rp11.836.746.000 dengan mutasi sebesar Rp 0. Semua aset tanah digunakan oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebagai penunjang kegiatan di Satwas dan Wilker PSDKP yang merupakan wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak. Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

Rincian Tanah Per Tanggal 30 Juni 2025

No	Luas (m ²)	Lokasi	Nilai
1	44.908	Jl. Dr. M. Hatta, Kubu Raya, Kalimantan Barat	10.543.141.000
2	552	Jl. Malindo, Entikong, Kalimantan Barat	412.867.000
3	934	Jl. Hayam Wuruk, Ketapang, Kalimantan Barat	475.509.000
4	3.431	Jl. Swadaya, Waringin Barat, Kalimantan Tengah	405.229.000
Jumlah			11.836.746.000

Peralatan dan

Mesin

Rp59.872.496.288

C.16 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2025 adalah Rp59.872.496.288 dan Rp60.109.804.498 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp237.308.210. Rincian mutasi nilai peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	60.264.230.048
Mutasi tambah:	
Pembelian	31.413.000
Perolehan lainnya	18.847.800
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(287.569.010)
Saldo per 30 Juni 2025	60.026.921.838
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(58.394.462.936)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	1.632.458.902

Mutasi penambahan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp50.260.800 diperoleh dari:

- Pembelian 2 buah Lap Top dengan nilai perolehan Rp 31.413.000 dengan SPM nomor 00360A tanggal 16 Juni 2025.
- Transfer masuk sebesar (Rp18.847.800) dengan nilai buku Rp4.711.950 berupa perangkat pengolah data (laptop) Transfer masuk merupakan perpindahan aset dari Stasiun PSDKP Tahuna dengan Nomor

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

BAST nomor 235/PSDKPSta.4/PL.450/VI/2025
tanggal 16 Juni 2025.



No	Uraian	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	Laptop	2	31.413.000		
TOTAL		2	31.413.000	0	-

*Gedung dan
Bangunan*

Rp14.586.826.318

C.17 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 14.586.826.318 dan Rp 14.402.001.836. Mutasi tambah sebesar Rp 184.824.482 terhadap Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal pelaporan 30 Juni 2024. Rincian mutasi nilai Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	14.402.001.836
Mutasi tambah:	
• Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	184.824.482
Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi	-
Mutasi kurang:	
Transaksi normalisasi BMN	-
Saldo per 30 Juni 2025	14.586.826.318
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(2.457.832.391)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	12.128.993.927

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi*

Rp22.153.264.709

C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp22.153.264.709 dan Rp22.153.264.709. Mutasi saldo jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp0.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	22.153.264.709
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Pengembangan Nilai Aset (langsung)	
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 30 Juni 2025	22.153.264.709
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(10.982.145.421)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	11.171.119.288

C.19 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp647.298.080*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp647.298.080 dan Rp647.298.080. Nilai tersebut diperoleh dari Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada berupa Peta Digital sebanyak 2 buah melalui Berita Acara Serah Terima Nomor BA.09861/PSDKP.I/PL.430/III/2017 tanggal 2 Maret 2017.

C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian mutasi KDP per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai KDP	
Mutasi kurang:	-
Penghapusan KDP	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

Mutasi tambah KDP sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

No	Jenis KDP	Volume	Lokasi	Kontraktor	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Nilai KDP
Jumlah								0

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp71.785.343.628*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing – masing Rp71.785.343.628 dan Rp.70.160.999.653 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	59.872.496.288	-58.345.365.816	118.217.862.104
2	Gedung dan Bangunan	14.586.826.318	-2.457.832.391	17.044.658.709
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.153.264.709	(10.982.145.421)	33.135.410.130
4	Aset Tetap Lainnya	647.298.080		647.298.080
Akumulasi Penyusutan		97.259.885.395	-71.785.343.628	169.045.229.023

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

C.22 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2025 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain
Rp0*

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2025 adalah Rp0 dan Rp.187.851.098.

*Akumulasi
Penyusutan dan*

C.24 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 30 Juni 2025

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

*Amortisasi Aset
Lainnya Rp0*

dan 31 Desember 2025 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi tersebut berasal dari akumulasi aset tak berwujud dan aset lain – lain.

C.25 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN
Rp120.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp120.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjaan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Persediaan yang diajukan ke KPPN sebesar Rp0 dan TUP sebesar Rp0

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp458.371.515*

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 458.371.515 dan Rp.0 Rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

- Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp384.322.235 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran Gaji Induk Pegawai Bulan Juli Tahun 2025 untuk 45 Pegawai pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp 201,784,023 dengan nomor SPM 00353T/440847/2025 tanggal 11 Juni 2025.
 - Pembayaran Gaji Induk Pegawai Bulan Juli Tahun 2025 untuk 28 Pegawai Pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp 117,866,725 dengan SPM nomor 00354T/440847/2025 tanggal 11 Juni 2025.
 - Pembayaran Gaji Induk Pegawai PPPK Bulan Juli 2025 untuk 7 Pegawai Pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp 23,471,070 melalui SPM nomor

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

00349T/440847/2025 tanggal 11 Juni 2025.

- Pembayaran Gaji Induk Pegawai PPPK Bulan Juli 2025 untuk 11 Pegawai Pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp 41,200,417 dengan SPM nomor 00350T/440847/2025 tanggal 11 Juni 2025
- Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp 74,049,280 yang merupakan Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2025 untuk 24 Pegawai Nomor SK: 10/PSDKPSta.4/KP.120/I/ 2025 Tanggal 02-01-2025 Pada Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025 dengan nomor SPM 00377T/440847/2025 tanggal 23 Juni 2025.

*Utang yang
belum Diterima
Tagihannya
Rp24.566.005*

C.27 Utang yang belum diterima tagihannya

Tidak terdapat utang yang belum diterima tagihannya pada 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp.3.326.500 dan Rp0. Rincian utang yang belum diterima tagihannya berupa kwitansi yang belum dibuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) adalah sebagai berikut:

- 00640/PB/440847/2025 tanggal 20 Juni 2025 sebesar Rp6.500
- 00639/PB/440847/2025 tanggal 20 Juni 2025 sebesar Rp2.230.000
- 00634/PB/440847/2025 tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp400.000
- 00633/PB/440847/2025 tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp690.000

*Pendapatan
yang
Ditangguhkan
Rp0*

C.28 Pendapatan yang Ditangguhkan

Tidak terdapat Pendapatan Ditangguhkan 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Pendapatan

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

Diterima di Muka Tidak terdapat Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Rp0

Beban yang

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Masih Harus

Dibayar

Rp384.322.235

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp384.322.235 dan Rp0. Beban tersebut merupakan SPM yang sudah diajukan pembayarannya ke KPPN namun belum terbit SP2Dnya, berupa:

- Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp384.322.235 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran Gaji Induk Pegawai Bulan Juli Tahun 2025 untuk 45 Pegawai pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp 201,784,023 dengan nomor SPM 00353T/440847/2025 tanggal 11 Juni 2025.
 - Pembayaran Gaji Induk Pegawai Bulan Juli Tahun 2025 untuk 28 Pegawai Pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp 117,866,725 dengan SPM nomor 00354T/440847/2025 tanggal 11 Juni 2025.
 - Pembayaran Gaji Induk Pegawai PPPK Bulan Juli 2025 untuk 7 Pegawai Pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp 23,471,070 melalui SPM nomor 00349T/440847/2025 tanggal 11 Juni 2025.
 - Pembayaran Gaji Induk Pegawai PPPK Bulan Juli 2025 untuk 11 Pegawai Pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar Rp 41,200,417 dengan SPM nomor 00350T/440847/2025 tanggal 11 Juni 2025

Ekuitas

C.29 Ekuitas

Rp37.004.521.452

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp37.004.521.452 dan

Rp39.036.740.009. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp320.

Beban Pegawai

Rp6.710.896.993

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.710.896.993 dan Rp6.910.296.602. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
Per 30 Juni 2025 dan 2024*

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok	2.819.309.800	2.940.135.800	- 4,11
Beban Pembulatan Gaji	43.807	50.204	- 12,74
Beban Tunjangan-Tunjangan	3.608.527.386	3.601.899.598	0,18
Beban Uang Makan	208.411.000	185.955.000	12,08
Beban Lembur	74.605.000	182.256.000	- 59,07
Jumlah Beban Pegawai (LO)	6.710.896.993	6.910.296.602	- 2,89
Belanja Pegawai Tahun yang Lalu		-	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Pegawai		926.482	-100,00
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	(549.218.555)	(408.313.301)	-
Jumlah Beban Pegawai (Neraca)	6.161.678.438	6.502.909.783	- 5,25

Beban

Persediaan

Rp31.612.500

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp31.612.500 dan Rp90.786.022. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	31.612.500	90.786.022	(65,18)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya		-	-
Jumlah Beban Persediaan	31.612.500	90.786.022	(65,18)

Beban Barang

dan Jasa

Rp4.161.785.049

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.161.785.049 dan Rp5.866.334.887. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	583.206.294	653.077.705	-10,70
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	81.201.089	108.885.020	-25,42
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.146.000	5.623.200	-61,84
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	39.150.000	36.972.000	5,89
Beban Barang Operasional Lainnya		3.847.561.908	-100,00
Beban Bahan	2.267.931.410	6.500.000	34.791,25
Beban Honor Output Kegiatan		667.987.264	-100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	743.197.980	13.868.100	5.259,05
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel		233.166.311	
Beban Langganan Daya dan Jasa	252.287.776	74.149.179	240,24
Beban Jasa Konsultan		6.184.200	
Beban Sewa	169.352.000	110.000.000	53,96
Beban Jasa Profesi		20.700.000	
Beban Jasa Lainnya	23.312.500	81.660.000	-71,45
Jumlah Beban Barang dan Jasa (LO)	4.161.785.049	5.866.334.887	-29,06
Pembayaran Beban Tahun Lalu		56.643.787	-100,00
Ralat SPM			
Utang		(94.008.032)	
Jumlah Beban Barang dan Jasa (NERACA)	4.161.785.049	5.828.970.642	-28,60

*Beban
Pemeliharaan
Rp582.444.363*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing – masing sebesar Rp582.444.363 dan Rp1.115.930.960. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Juni 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.931.004	5.931.004	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	471.265.309	468.635.309	0,56
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2.799.414	2.799.414	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	758.023	758.023	-
Beban Persediaan Suku Cadang	101.690.613	69.365.411	31,79
Jumlah	582.444.363	547.489.161	6,38

Beban Perjalanan Dinas
Rp193.656.059

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp193.656.059 dan Rp1.138.402.077. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	168.346.231	872.026.092	-418,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.450.000	73.090.000	-673,44
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		60.000.000	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.859.828	133.285.985	-740,40
Jumlah Beban Perjalanan Dinas (LO)	193.656.059	1.138.402.077	-487,85
Pengembalian belanja	0	0	#DIV/0!
Utang yang belum ditagihkan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Beban Perjalanan Dinas (NERACA)	193.656.059	1.138.402.077	-487,85

Tidak terdapat selisih beban perjalanan dinas di LO dan Neraca.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak ada Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2025 dan 2024.

Beban Bantuan

D.8 Beban Bantuan Sosial

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

Sosial Rp0 Tidak ada Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2025 dan 2024.

Beban

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan

dan Amortisasi

Rp1.821.158.593

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.821.158.593 dan Rp1.821.223.753. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
30 Juni 2025 dan 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.376.075.825	1.397.564.283	- 1,56
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	162.669.118	141.245.821	13,17
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	282.413.650	282.413.649	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah		-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.821.158.593	1.821.223.753	- 0,00

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 2025 sebesar Rp0 dan Rp0.

Defisit dari

D.12 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non

Operasional

Rp2.776.624

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Nilai kegiatan

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

non operasional sebesar Rp2.776.624 diperoleh dari:

- a. Pendapatan pelepasan aset sebesar Rp2.775.888 yang diperoleh Risalah Lelang BMN lainnya melalui:
 - Penjualan peralatan komputer, perabot kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp2.775.888 dengan NTPN E83ACONAODEJ64SF dan NTB 097479705158 tanggal 22 Januari 2025 melalui risalah lelang nomor 9/11.01/2025-01 tanggal 20 Januari 2025.
- b. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp736 yang diperoleh dari:
 - Pembulatan gaji sebesar Rp504 yang dibayarkan melalui nomor SPM 00020A tanggal 13 Januari 2025
 - Pembulatan gaji sebesar Rp232 yang dibayarkan melalui nomor SPM 00021A tanggal 14 Januari 2025.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

30 Juni 2025 dan 2024

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.776.624	9.318.828	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	233.338	
Jumlah Pelepasan Aset Non Lancar	2.776.624	9.085.490	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	763	48	
Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu		0	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	48	-100,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	0	#DIV/0!
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	2.776.624	9.085.538	-69,44

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2017.

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0

Tidak ada saldo pada Pos Luar Biasa per 30 Juni 2025 dan 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp39.721.512.356

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp39.721.512.356 dan Rp41.153.798.446

Defisit LO

(Rp13.498.776.993)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp13.498.776.933) dan (Rp16.933.655.105). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak ada Koreksi nilai per 30 Juni 2025 dan 2024.

Koreksi Atas

Reklasifikasi

Rp0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas pencatatan klasifikasi BMN pada periode sebelumnya.

Barang yang dilakukan reklasifikasi semula berupa aset tetap peralatan dan mesin setelah dilakukan inventarisasi dapat disimpulkan bahwa BMN tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai aset tetap sebab tergolong barang habis pakai yang telah digunakan sejak BMN tersebut diperoleh, dengan nilai perolehan <Rp1.000.000. Koreksi reklasifikasi periode 30 Juni 2025 dan 2024 sebesar Rp0 dan Rp0

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 30 Juni 2025 dan 2024 sebesar Rp0.

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp152.958.193*

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas aset tetap yang diakibatkan adanya kenaikan asset tetap tersebut atau karena rendahnya nilai asset tetap dalam laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp152.958.193 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-lain
Rp0*

E.3.5 Koreksi Lain-lain LPE

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 sebesar Rp0 dan Rp19.438. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Rp10.628.827.836 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.628.827.836 dan Rp Rp14.816.577.230 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	2.776.624
Ditagihkan ke Entitas Lain	(10.671.644.763)
Transfer Masuk	4.711.950
Transfer Keluar	44.752.253
Jumlah	(10.619.403.936)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025 dan 2024, DDEL sebesar (Rp2.776.624) dan (Rp13.206.796), sedangkan DKEL sebesar Rp10.671.644.763 dan Rp14.829.784.026

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Keluar dengan nilai buku sebesar Rp. 44.752.253 Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk/transfer keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp 44.752.253 dan Rp0.

- Transfer masuk sebesar (Rp18.847.800) dengan nilai buku Rp4.711.950 berupa perangkat pengolah data (laptop) Transfer masuk merupakan perpindahan aset

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

dari Stasiun PSDKP Tahuna dengan Nomor BAST nomor 235/PSDKPSta.4/PL.450/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025.

- Transfer Keluar sebesar (Rp16.169.010) dengan nilai buku Rp4.042.253 berupa perangkat pengolah data (laptop) Transfer masuk merupakan perpindahan aset dari Stasiun PSDKP Tahuna dengan Nomor BAST Nomor:B.733/PSDKPSta.6/PL.930.VI/2025 Tanggal 03 Juni 2025
- Transfer Keluar Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya NUP 4 senilai (Rp271.400.000) dengan nilai buku Rp 40.710.000 dengan berita acara serah terima barang milik negara nomor 86/PSDKPSta.4/PL.450/II/2025 tanggal 24 Februari 2025.

Ekuitas Akhir
Rp37.004.521.452

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp37.004.521.452 dan Rp39.036.740.009

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
NERACA**

Tidak ada kejadian penting sampai akhir periode pelaporan per 30 Juni 2025 pada Stasiun PSDKP Pontianak.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pejabat pengelola keuangan Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PA-KPA/PSDKPSta.4 /KU.110/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 Tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PA-KPA/PSDKPSta.4 /KU.110/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak yaitu:
 - PPK : Eko Iswahyudi, S.Pi
 - PPSPM : Rachmat Muharyakinsyah, A.Md
 - Pengangkatan Bendahara Pengeluaran yaitu Amil Maulana sesuai dengan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak Nomor

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

4/KPA/PSDKPSta.4/KU.110/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Pontianak.

2. Pelaksanaan revisi sampai dengan 30 Juni 2025 sebanyak 5 (lima) kali dengan *digital stamp* DIPA SP DIPA-032.05.2.440847/2025 tanggal 24 November 2024 dengan nomor digital stamp 2873-4272-0545-5000 yaitu:
 - Revisi ke 1 tanggal 25 Januari 2025 dengan digital stamp DS: 9582-0293-8129-7200 yang merupakan revisi Direktorat Jenderal Anggaran berupa buka blokir sebesar Rp100.000.000 serta pemblokiran anggaran dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global melalui automatic adjustment (pencadangan anggaran) sebesar Rp1.991.920.000.
 - Revisi ke 2 tanggal 7 Februari 2025 dengan Digital Stamp DS: 9582-0293-8129-7200 yang merupakan revisi Kanwil DJPb berupa pergeseran anggaran dengan pagu tetap dalam rangka rencana penarikan dana dengan melakukan pemutakhiran Halaman III DIPA serta pemutakhiran revisi POK.
 - Revisi ke 3 tanggal 22 April 2025 yang merupakan revisi Kanwil DJPb dengan digital stamp DS:2084-0506-0580-7385 berupa pergeseran anggaran dalam satu RO pada Armada Pengawasan yang dirawat (2350.RCG.001) sebesar Rp260.556.000 yang semula akan digunakan untuk Docking Kapal Pengawas Hiu Macan 01 menjadi penambahan anggaran untuk kegiatan Repowering Gearbox Kapal Pengawas Hiu Macan 01. Pergeseran anggaran dalam satu RO Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya (2353.QIC.004) berupa

penambahan belanja modal dari belanja barang sebesar Rp41.196.000 yang dipergunakan untuk pembelian kelengkapan pelayanan publik.

- Revisi ke 4 tanggal 1 Mei 2025 yang merupakan revisi DJA dengan DS:2143-7527-3625-8851 berupa buka blokir melebihi RKBMN pemeliharaan sebesar Rp19.840.000.
 - Revisi ke 5 tanggal 30 Mei 2025 yang merupakan revisi kewenangan KANWIL dengan digital stamp DS:2143-7527-3625-8851 berupa pergeseran anggaran dalam satu RO Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun (2350.CBQ.001) berupa penambahan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana pendukung pengawasan SDKP sebesar Rp15.000.000 serta pergeseran anggaran dalam satu RO yaitu Layanan Perkantoran berupa gaji dan tunjangan berupa pemenuhan anggaran oleh karena adanya pagu minus pada belanja gaji dan tunjangan pegawai PNS dan PPPK.
3. Terdapat saldo Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) Tahun 2024 yang dibayarkan di tahun 2025. SPM penampungan RPATA diterbitkan di TA 2024 dengan nomor SPM 00825T/440847/2024 tanggal 20 Desember 2024 dan SP2D nomor 230420301000253 tanggal 22 Desember 2024 sebesar Rp187.851.098 yang merupakan belanja pemeliharaan jalan lingkungan Stasiun PSDKP Pontianak yang telah selesai pekerjaannya tanggal 27 Desember 2024 melalui BAST nomor BAST.351/PPK.Sta.4/XII/2024 yang pembayarannya dilaksanakan di tahun anggaran 2025 melalui SPM nomor 00005T/440847/2025 tanggal 3 Januari 2025 dan SP2D nomor 249991305000007

tanggal 3 Januari 2025 sebesar Rp187.851.098.

4. Berdasarkan Berita Acara Sisa Bahan Bakar Minyak Akhir Bulan Juni 2025 Kapal Pengawas Hiu Macan 01 Nomor: 093/Sta.4-HMC.01/PW.430/VI/2025, tanggal 30 Juni 2025 sisa Bahan Bakar Minyak sebanyak 6.100 liter dan Kapal Pengawas Hiu 11 Nomor: 168/Sta.4-HIU.11/PW.431/VI/2025, tanggal 30 Juni 2025 sisa Bahan Bakar Minyak sebanyak 9.450 liter. Pagu anggaran Bahan Bakar Minyak Kapal Pengawas sebesar Rp4.469.848.000,- (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Rp2.140.164.000,- (dua miliar seratus empat puluh juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) Rupiah Murni (RM) dan Rp2.329.684.000,- (dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) PNBPN, yang kemudian di addendum menjadi Rp10.839.382.000,- (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari Rp5.121.834.000,- (lima miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) Rupiah Murni (RM) dan Rp5.717.548.000,- (lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) PNBPN. Realisasi anggaran Bahan Bakar Minyak Kapal Pengawas sampai dengan 30 Juni 2025 sebanyak 108.000 liter dengan nilai Rp1.943.098.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian yang telah dilakukan pembayaran, telah SP2D sebesar Rp1.371.065.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu rupiah) dan yang belum

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

dilakukan pembayaran sebesar Rp572.033.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah).

Nama Kapal	Bulan	Sisa Volume BBM Awal (Liter)	Jumlah Pengisian (Liter)	Pemakaian (Liter)	Jumlah Sisa BBM Akhir (Liter)
a	b	d	e	f	h = (d+e-f)
KP. Hiu 11	Januari	12.300	-	1.150	11.150
	Februari	11.150	-	350	10.800
	Maret	10.800	-	250	10.550
	April	10.550	-	200	10.350
	Mei	10.350	20.000	19.900	10.450
	Juni	10.450	12.000	13.000	9.450
KP. Hiu Macan 01	Januari	19.200	-	1.500	17.700
	Februari	17.700	-	1.200	16.500
	Maret	16.500	13.000	14.400	15.100
	April	15.100	15.000	2.300	27.800
	Mei	27.800	26.000	45.600	8.200
	Juni	8.200	22.000	24.100	6.100

Berdasarkan Berita Acara Sisa Minyak Pelumas Akhir Bulan Juni 2025 Kapal Pengawas Hiu Macan 01 Nomor: 097/Sta.4-HMC.01/PW.430/VI/2025, tanggal 30 Juni 2025 sisa Minyak Pelumas M/E, A/E, Gearbox SAE 10W-40 sebanyak 195 liter dan Minyak Pelumas Hidraulik sebanyak 72 liter dan Kapal Pengawas Hiu 11 Nomor: 170/Sta.4-HIU.11/PW.431/VI/2025, tanggal 30 Juni 2025 sisa Minyak Pelumas M/E dan A/E SAE 10W-40 sebanyak 432 liter, Minyak Pelumas Gearbox SAE 30 sebanyak 32 liter dan Minyak Pelumas Hidraulik SAE 10 sebanyak 17 liter.

- Sampai dengan saat ini 30 juni 2025 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp2.775.888 dengan rincian:
 - Penjualan peralatan komputer, perabot kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp2.775.888 dengan NTPN E83ACONAODEJ64SF dan NTB 097479705158

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

tanggal 22 Januari 2025 melalui risalah lelang nomor 9/11.01/2025-01 tanggal 20 Januari 2025.

- Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Rp736 yang dibayarkan melalui nomor SPM 00020A tanggal 13 Januari 2025 dan nomor SPM 00021A tanggal 14 Januari 2025.

6. Sampai dengan 30 Juni 2025 masih terdapat bangunan yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berdasarkan Undang – Undang No 11 Tahun 2020 dan PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung IMB tersebut telah berubah menjadi SLF (Surat Laik Fungsi) yaitu seluruh bangunan yang berada di Pontianak dan Wilker PSDKP Ketapang. Untuk SLF Kantor Wilker PSDKP Ketapang sampai dengan pelaporan telah berkoordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Ketapang dan mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan SLF. Sedangkan untuk Kantor Pontianak batas tanah secara digital dari BPN tidak sesuai eksistingnya yang terbit di dalam sertifikat tanah Kantor Stasiun PSDKP Pontianak, sehingga permasalahan tersebut sedang diajukan oleh Biro Hukum KKP ke Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
7. Sesuai dengan Rencana Aksi Tindak Lanjut rekomendasi BPK RI lingkup Ditjen PSDKP Nomor 1092/PSDKP.1/TU.210/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025, yakni terkait temuan BPK RI atas LK KKP periode TA 2010 – 2021 yakni BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan KPB

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER I 2025

terkait supaya menginput bukti kepemilikan yang sah atas aset tetap tanah, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin, pada Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 65 NUP senilai Rp56.647.948.442 yang telah ditindaklanjuti sebanyak 64 NUP senilai Rp56.587.948.422 sehingga sampai dengan tanggal pelaporan masih tersisa sebanyak 1 NUP senilai Rp60.000.000 berupa speedboat/motor tempel yang terdapat pada Kapal Pengawas Hiu Macan 01 yang masih belum ditindak lanjuti. Hal tersebut disebabkan motor tempel tersebut merupakan bagian dari sekoci yang terdapat pada Kapal Pengawas Hiu Macan 01 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kapal Pengawas Hiu Macan 01 sehingga tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah dari mesin tempel tersebut.

8. Aset yang telah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaannya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan	Belum Ditetapkan Status Penggunaan	Dalam Proses Pengajuan (Rp)
		(Rp)	(Rp)	
1	Tanah	11.836.746.000	-	-
2	Peralatan dan Mesin	59.995.508.838	31.413.000	-
3	Gedung dan Bangunan	14.586.826.318	-	-
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	22.153.264.709	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	647.298.080	-	-
TOTAL		109.219.643.945	31.413.000	0